

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN LOCKDOWN, PHK, PSBB SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STABILITAS SISTEM MONETER

Pebri Hastuti*

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: Pebrihastuti06@gmail.com

Dita Natania Harefa

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: Ditanatania88@gmail.com

Januarti Ira Melenia Napitupulu

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: Melenianapitupulu@gmail.com

ABSTRAK

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia dengan melakukan peninjauan terhadap beberapa kebijakan Lockdown, PHK, dan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi COVID-19. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan analisis data, reduksi data, display data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Terdapat banyak sector perekonomian yang terkena imbas akibat dari COVID-19 ini. Kondisi ini menjelaskan penurunan kegiatan ekonomi akibat terdampak Covid 19. Hal ini bisa saja membuat perekonomian kita melemah bahkan lumpuh jika tidak ada penanganan serius. Dalam setiap kebijakan pemerintah perlu melihat apakah hal tersebut akan berjalan seefektif mungkin. Ketidakpastian ekonomi ini pun sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa bekerja dengan baik, namun dikarenakan mewabahnya virus ini semua kegiatan ekonomilumpuh.

Kata kunci: Covid-19, Lockdown, PHK, PSBB, Perekonomian Indonesia

PENDAHULUAN

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Sebelumnya virus sejenis ini sudah pernah terjadi di beberapa negara. SARS yang pernah muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain. Mulai dari Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang harus kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Namun, virus ini kembali mewabah. Pertama sekali terjadi di Kota Wuhan pada Desember 2019 dan jenis virus ini ialah COVID-19 atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus. Virus ini menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020. Penyebaran utama coronavirus baru ini adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tetesan air liur atau cairan/ lendir hidung orang yang terinfeksi.

Virus ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sederhana, sebab virus ini sudah mendunia dan semua negara ikut merasakannya termasuk Indonesia. Di awal tahun 2020 ini, virus corona menjadi sejarah besar bagi setiap bangsa terutama bangsa Indonesia. Dengan tidak memerlukan waktu yang lama, virus ini bisa menyebar dengan sangat cepat hingga ke berbagai negara. Jika kita melihat dari gejala yang timbul akibat terpapar virus corona, mungkin kita mengira ini hanya sebatas influenza biasa. Namun perlu kita ketahui bahwa virus ini sangat berbahaya bahkan bisa mengancam keselamatan hidup seseorang. Dengan keadaan mewabahnya virus corona ini, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diaturnya agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Seluruh kegiatan di minta agar dilakukan di rumah saja, jika tidak ada hal yang penting maka tidak perlu untuk keluar rumah. Seluruh kegiatan apapun dilaksanakan di rumah saja bahkan untuk bekerja dan beribadah pun harus dilakukan di rumah. Hal ini yang sementara dapat dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona. Kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Banyak sekali kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Semua hal dilakukan demi terciptanya kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan yang sudah diketahui apa yang akan terjadi jika hal ini dilakukan. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan berdampak ke berbagai bidang yang ada khususnya ekonomi.

Dampak mewabahnya virus corona ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan saja bahkan turut mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia terutama Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hal ini sangat merisaukan masyarakat. Maka pemerintah pun ikut mengambil keputusan dengan kebijakan yang sudah di pertimbangkan. Kebijakan yang muncul akibat mewabahnya virus ini ialah penutupan akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi dan jam operasional transportasi yang disebut dengan kebijakan lockdown dan PSBB. Tentunya hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Dengan kebijakan ini diharapkan mampu mencegah penyebaran virus corona dan dapat terhindar dari virus ini. Akibat lainnya yang timbul ialah banyaknya

masyarakat yang terkena PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan hal ini, maka sudah jelas bahwa masyarakat akan sulit dalam memperoleh pendapatannya akibat tidak bekerja lagi dan sudah pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sungguh besar dampak yang terjadi akibat mewabahnya virus ini sehingga masyarakat mulai ketakutan untuk mempertahankan hidupnya. Virus ini juga akan mengganggu ekonomi moneter Indonesia dalam hal stabilitas perekonomiannya. Keadaan ini juga mengganggu sistem moneter kita, dimana penurunan jumlah penawaran uang yang terjadi. Dapat berdampak terhadap deflasi. Oleh sebab itu, artikel ini hadir untuk melihat sejauh mana dampak dari mewabahnya virus corona ini bagi masyarakat Indonesia terutama bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Artikel ini pun juga bertujuan untuk melihat bagaimana kesesuaian antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mencegah penyebaran virus corona ini. Dalam permasalahan diatas maka akan kita lihat pula bagaimana perkembangan kasus virus corona ini di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ini? Dalam penelitian ini, peneliti juga membahas apa saja yang dapat dilakukan pemerintah saat ini ditengah keadaan yang risau. Selain itu mengevaluasi kebijakan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Keadaan ini juga dapat mengganggu sistem stabilitas moneter.

Pandemi virus COVID-19 memiliki konsekuensi luas di luar penyebaran penyakit dan upaya karantina. Ketika pandemi telah menyebar di seluruh dunia, negara-negara yang terserang penyakit ini menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Beberapa negara akan menghadapi kesulitan ekonomi menghadapi masalah ini, jika kondisi ini tetap tidak berubah. Itu sebabnya peneliti ingin menganalisis dampak sebenarnya pada perekonomian Indonesia juga dengan beberapa upaya penyelesaian yang berikan pemerintah.

Tujuan luas dari penelitian ini adalah untuk menemukan dampak coronavirus terhadap perekonomian Indonesia dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani hal ini terutama pada para pekerja yang terdampak akibat virus ini. Untuk menganalisis kondisi ekonomi negara ini saat ini, menemukan perubahan yang tepat dalam kondisi ekonomi negara ini karena corona virus dan mencari solusi yang tepat yang dapat diaplikasikan pada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19 ini.

METODE

Data telah dikumpulkan dari sumber data sekunder. Sebagai sumber data sekunder, peneliti telah menggunakan banyak situs web yang mencakup data terkait ekonomi, *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), situs web Badan Pusat Statistik (BPS), situs resmi *World Health Organization* (WHO), *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), jurnal-jurnal resmi seperti *Oxford Academic Journal*, *BMJ Journals*, *The Lancet*, *Wonderful Indonesia*, beberapa surat kabar harian terkenal di Indonesia, Situs web Dailymail, BBC, CNN, CNN Indonesia dan sumber-sumber lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi *penting* dalam melakukan analisis data dengan cara

reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data.

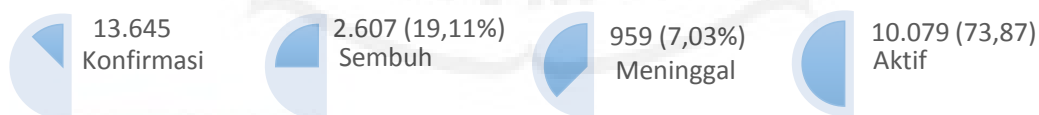
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persebaran Virus Corona di Indonesia

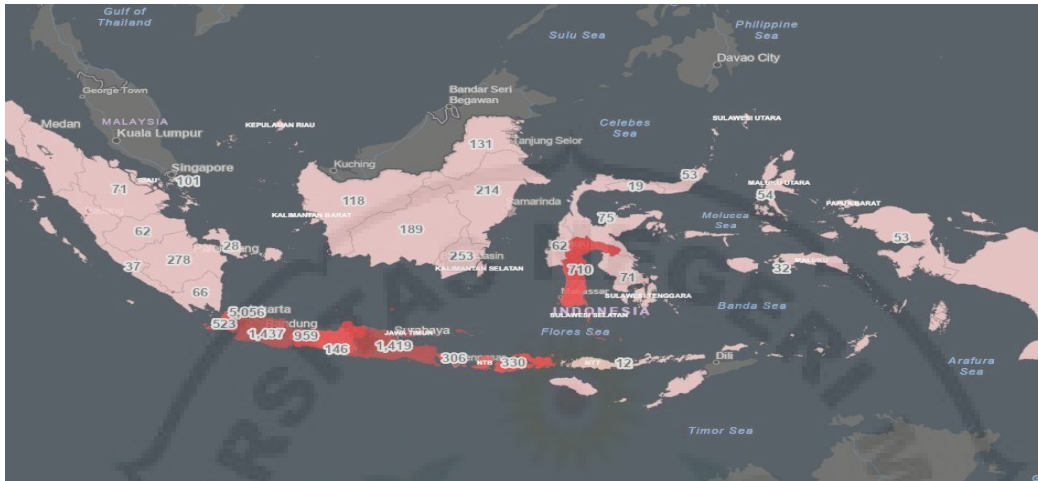
Seluruh negara di dunia saat ini sedang dihadapkan pada darurat kesehatan global yang mengancam seluruh aspek kehidupan yang disebabkan oleh munculnya sebuah wabah, yang disebabkan oleh serangan virus mematikan atau lazimnya disebut dengan COVID-19. Virus tersebut memiliki gejala seperti flu dan infeksi pernafasan. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa virus ini sebagai penyakit Covid-19 per 11 Februari 2020. Pernyataan baru dirilis oleh WHO, per 11 Maret 2020, terkait perubahan status PHEIC menjadi pandemic, setelah terjadinya peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah laporan kasus dan jumlah kematian akibat virus ini di berbagai belahan dunia.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara 5,11 Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% (Susilo et al., 2020)

Dashboard Kasus COVID-19 di Indonesia (09 Mei 2020) Kumulatif



Indonesia kini masuk daftar peta persebaran COVID-19, *Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE*. Jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh terus bertambah. Hingga tanggal 09 Mei 2020 secara keseluruhan pasien sembuh mencapai 2.607 orang. Terdapat penambahan sebanyak 113 pasien sembuh perhari ini. Pasien sembuh terbanyak berasal dari DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Adapun penambahan jumlah juga terjadi pada pasien konfirmasi positif Covid-19 yang secara total sebanyak 13.645, dan pasien meninggal sebanyak 959. Spesimen yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 150.887 dari 108.699 orang. Jubir Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto mengatakan keberhasilan dalam mencegah penularan SARS- CoV-2 adalah dengan berdiam diri di rumah, jaga jarak, biasakan cuci tangan pakai sabun.



Gambar 1. Peta Persebaran COVID-19 di Indonesia

Jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi hingga 09 Mei 2020 mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Tercatat jumlah laporan kasus di seluruh Indonesia sebanyak 13.645 dengan jumlah kematian sebesar 959 jiwa dan jumlah pasien yang berhasil disembuhkan sebesar 2.607 jiwa. Menurut Achmad Yuriyanto dalam Konferensi Pers di Gedung BNPB, Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 disiplin *physical distancing*, tidak ke luar rumah, tidak mudik akan jadi kunci keberhasilan mencegah penularan. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus dilakukan oleh semua pihak.

2. Tinjauan Kebijakan *Lockdown*

Dalam upaya memerangi pandemi Virus Corona, berbagai negara di dunia telah mengambil serangkaian kebijakan guna melindungi negaranya. Sejauh ini, kebijakan paling ekstrem yang diambil adalah *lockdown*. Kebijakan *lockdown* berarti mengunci semua akses keluar masuk di negara atau kawasan tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat pun diatur sedemikian rupa agar tidak berkeliaran dan berkerumun di tempat umum. Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan *lockdown* adalah China, Italia, Prancis, dan Malaysia. Penerapan kebijakan ini tentu memiliki dampak dan resikonya masing-masing. Dan resiko serta dampak tersebut tidaklah kecil. Banyak sektor dalam kehidupan masyarakat berhenti beroperasi. Suasana kota menjadi sepi. Kendaraan tidak banyak lagi yang hilir mudik di jalan. Para warga pun terkunci di dalam rumah, dalam upaya mereka mematuhi perintah *social distancing* dan karantina mandiri. Bukan hal yang terjadi secara kebetulan. Negara yang menerapkan *lockdown* adalah negara maju.

Terkait kebijakan *lockdown*, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya (Indriya, 2020). Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan

menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas (Indriya, 2020). Kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk memutus penyebaran rantai virus corona. Sementara kebijakan ini menjadi kebijakan yang alternatif bagi kepentingan bersama. Tetapi Bapak Joko Widodo sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia belum memutuskan untuk memberlakukan di Indonesia. Mengapa hal ini belum dilakukan dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini sangat luas, sehingga pemerintah Indonesia masih hanya memberlakukan sistem *Social Distancing* dan *Work From Home*.

Dapat kita lihat, pemberlakuan dirumah saja sudah sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Terutama bagi masyarakat yang bekerja harian dan bekerja di luar ruangan. Kebijakan ini memang tidak sangat berdampak pada mereka yang berkerah putih. Perdebatan yang terjadi antara masyarakat dengan berbagai kebijakan yang dilakukan timbul di tengah-tengah masyarakat. Alasan utama mengapa lockdown belum diterapkan di Indonesia adalah alasan ekonomi. Ketika kebijakan lockdown diberlakukan maka Indonesia harus siap dalam menghadapi perekonomian yang akan terjadi. Indonesia belum siap untuk adanya pemberlakuan lockdown ini. *Lockdown* berarti menutup total akses dari segala penjuru, di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi akan lumpuh. Dan ini adalah dampak *lockdown* terburuk bagi Indonesia. Perekonomian merupakan satu kesatuan arus mengalir (*circular flow*) yang terdiri dari masyarakat konsumen dan produsen. Secara sederhana, pengeluaran satu entitas merupakan rezeki bagi yang lainnya. Produksi dari satu entitas tidak hanya merupakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi, tetapi juga pendapatan bagi rumah tangga yang bekerja di pabrik dan rumah tangga produksi. Tentunya jika lockdown diberlakukan, maka perekonomian akan terhenti. Sementara kebutuhan harus tetap berjalan.

Pemerintah sangat memperhatikan hal ini, karena dampaknya akan sangat luas. Ketika masyarakat tidak dapat lagi bekerja dan otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka ini berdampak sangat buruk. Masyarakat bisa saja akan tersiksa ditengah keadaan ini. Lingkaran setan kemiskinan pun akan terus meningkat jika hal ini dilakukan. Pemerintah perlu langkah cepat, mantap dan hati-hati untuk menyelesaikan masalah ini. Dikutip dari artikel yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, dari segi pelaku sektor produksi, perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pada 2019, entitas produksi Indonesia didominasi UMKM, yaitu 99,99 persen dari total jumlah unit usaha yang ada. Sementara itu, dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sekitar 63 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pada 2019, entitas produksi Indonesia didominasi UMKM, yaitu 99,99 persen dari total jumlah unit usaha yang ada. Sementara itu, dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sekitar 63 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bagi mereka yang bekerja di luar rumah, kesehatan dan penghidupan menjadi satu. Mereka berusaha mencari nafkah untuk tetap sehat dan mereka berusaha tetap sehat untuk dapat mencari nafkah. Sehingga, apabila *lockdown* diterapkan, yang paling besar merasakan dampaknya adalah pekerja-pekerja dengan pemasukan harian seperti ini. Untuk itu prinsip kehati-hatian perlu dilakukan. Kebijakan ini tentunya menurunkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Penawaran uang tentunya menjadi menurun. Sudah pasti keadaan ini akan mempengaruhi kesehatan perekonomian Indonesia.

3. Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona (Hanoatubun et al., 2020). Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemi ini serta banyak pabrik, toko, dan UMKM lainnya yang terpaksa menutup usaha mereka karena adanya pandemi ini. Dengan sangat terpaksa setiap perusahaan melakukan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja bagi para karyawannya. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi. Jika berkelanjutan maka hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan perekonomian Indonesia dan stabilitas moneter.

Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Sudah terkonfirmasi 8211 kasus yang terinfeksi oleh penyakit ini dengan 1002 orang sembuh dan jumlah kematian 689 jiwa. Terkenal juga dengan bonus demografi yang menjadi kekuatan utamanya. Namun hal ini, apakah hal ini akan menjadi kekuatan?. Jadi mereka tidak dapat mengambil bagian dalam sesi itu. Untuk itu peneliti berpikir bahwa pandemi ini dapat meningkatkan persentase pengangguran. Peneliti berusaha menganalisis pengaruh dan dampak yang terjadi dari kebijakan mewabahnya Virus Corona ini. Keadaan ini tentunya akan merusak dalam segi ekonomi dan sosial mereka.

Jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2 juta orang. Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM. Kita sangat berharap agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Namun sejauh yang terjadi saat ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Dengan adanya PHK ini pemerintah memberi solusi dengan adanya Kartu Pra Kerja. Namun solusi ini pun tampaknya tidak berpengaruh luas. Se jauh pemantauan yang dilakukan oleh penelliti, banyak masyarakat yang tidak berkesempatan.

Ekonom dari Institute for Development, Economic and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditangani, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak. Jika berkepanjangan akan menyebabkan kegagalan bisnis dan PHK yang memperburuk penurunan ekonomi. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan. Jika kita perhatikan, dampak yang timbul dari kasus Virus Corona sangat berbahaya. Akibat dari pengangguran, masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa kita sadari, jika hal ini terus menerus terjadi tanpa penanganan yang tepat. Maka bisa dipastikan akan terjadi deflasi. Dimana kurangnya jumlah uang beredar dimasyarakat, menimbulkan nilai mata uang bertambah tinggi. Jika kita

teliti, banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Lebih tepatnya dikarenakan penurunan permintaan terhadap barang ditengah pandemi ini. Penurunan terhadap permintaan barang juga salah satu masalah timbulnya deflasi. Hal lain, banyak bisnis atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu namun tidak memperhitungkan secara tepat kuantitas hasil produksi sehingga jika terlalu banyak produksi yang tidak diiringi dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk tersebut akan berakibat barang yang tidak lakudijual.

Barang yang tidak laku dijual menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Terutama bila hal ini terjadi ditengah pandemic Virus Corona memunculkan keputusan PHK dari perusahaan. Hal ini akan mengacaukan kondisi perekonomian suatu negara terutama Indonesia. Kondisi deflasi menyebabkan para pebisnis berlomba-lomba dalam menekan harga jual demi menarik minat konsumen. Jika hal ini terjadi lagi-lagi berimbas kepada PHK besar-besaran. Maka akan sangat banyak masalah yang timbul jika tidak berhati-hati untuk hal ini. Di samping itu, kesuksesan kebijakan tersebut mesti didukung setidaknya oleh empat pilar utama yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dukungan internasional. Tanpa soliditas dari stakeholders tersebut, kebijakan PHK bisa menjadi bomerang dan memicu krisis yang tidak kalah serius (Ahmad, 2020).

4. Tinjauan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB)

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang sudah terinfeksi virus corona guna menekan angka penyebarannya. Kementerian Kesehatan melakukan pembatasan ini pada daerah tertentu, dengan tujuan yang lebih besar karena melihat kondisi lingkungan masing-masing. Misalnya korban cukup banyak, atau yang belum terkena tidak melaksanakan beberapa aturan yang berlaku (melanggar) sehingga mengganggu jalannya aktivitas penyembuhan. Apakah langkah strategis yang diambil pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar efektif ? Tentu semua pihak masih melihat terlebih dahulu dampak kedepannya. Namun, kita semua berharap bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan PSBB ini adalah langkah yang terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dapat tetap terjaga sehingga beberapa aktivitas perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19 (Thorik, 2020). Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya, sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.

Di sisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Hampir di semua aspek kehidupan terganggu. Memandang bahwa dari prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang memburuk dengan penghasilan atau pendapatan rendah yang diperoleh. Bahkan negara harus mengucurkan dana untuk menunjang kebutuhan

hidup bagi rakyatnya yang dirumahkan atau untuk mengkonstruksi fasilitas medis baru. Menurut analisis International Monetary Fund (IMF), ekonomi global bakal susut setidaknya 3% tahun ini gara-gara pandemi. Sedangkan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia minus 0,4% tahun ini. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan awal Maret 2020 lalu, data Kementerian Ketenagakerjaan mendapati bahwa sudah ada 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia. Lebih buruk lagi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah pada aturan PSBB. Menurut penelusuran peneliti CSIS Noory Oktariza untuk The Jakarta Post, pergerakan keluar-masuk Jakarta sejak 3 April 2020 tetap tinggi. Tak sedikit yang bergerak dalam radius ratusan kilometer dari ibu kota, memperkuat dugaan bahwa jutaan penduduk ibu kota mudik duluan karena khawatir terhadap pandemi atau kehilangan pekerjaan.

5. Alokasi Dana Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar Rp. 405,1 Triliun untuk penanganan Covid-19. Alokasi anggaran tersebut masing-masing untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 75 Triliun, untuk Social Safety Net sebesar Rp. 110 Triliun, untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 70,1 Triliun, serta untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 150 Triliun, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan UMKM dan dunia usaha untuk menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi. Di bidang kesehatan, yang merupakan prioritas utama, dukungan anggaran digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, upgrade Rumah Sakit rujukan penanganan Covid-19, insentif dan santunan tenaga medis, dan penanganan kesehatan lainnya (Sekretaris Presiden:2020).

Melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2020) anggaran bantuan juga dialokasikan untuk perlindungan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per 31 Maret 2020. Program Keluarga Harapan (PKH) menerima Rp. 10 Juta untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan bulanan mulai April, sehingga bantuan setahun meningkat sebesar 25 Persen (Tirto:2020). Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 Juta menjadi 20 Juta penerima dengan manfaat kenaikan dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan, angka ini naik sebesar 33 Persen. Kartu Prakerja ikut mengalami peningkatan dari Rp. 10 Triliun menjadi Rp. 20 Triliun untuk mencakup sekitar 5,6 Juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat juga menerima insentif pasca pelatihan sebesar Rp. 600.000 dengan biaya pelatihan Rp. 1 Juta. Selanjutnya, biaya listrik akan dibebaskan untuk 3 bulan kepada 24 Juta pelanggan listrik 450VA dan pemberian potongan harga sebesar 50 Persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Bagi pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah akan memberikan insentif hingga 175 Ribu kuota rumah bersubsidi. Terakhir, dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok akan dikucurkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25 Triliun (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020).

Untuk menjaga dunia usaha tetap normal, pemerintah memberikan insentif perpajakan. PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp. 200 Juta dalam setahun menjadi tanggungan pemerintah sebesar 100 Persen. Pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil menengah ditempuh pemerintah. Selanjutnya, PPh dikurangi sebesar 30 Persen dari angsuranyang seharusnya tertuang. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan juga ikut diatur. Kemudian, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 Persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 Persen mulai tahun 2022. Percepatan restitusi insentif PPh bagi 19 sektor tertentu menjadi kebijakan terakhir untuk perpajakan, yang mana hal itu dilakukan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), refocusing dan realokasi anggaran belanja diterapkan pemerintah untuk penanganan pandemik ini dengan melakukan penghematan belanja. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DAD) dengan harapan kepala daerah dapat mengoptimalkan langkah tersebut untuk pencegahan Covid-19, sehingga akan terjadi penghematan sebesar Rp. 190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Triliun.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kebijakan non-fiskal. Penyederhanaan larangan terbatas ekspor dan impor, serta percepatan layanan ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) diterapkan demi menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020). Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan dengan menurunkan BI 7 Day Repo Rate pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps untuk menjaga konsumsi masyarakat ditengah wabah ini dan mengendalikan tingkat inflasi, yang telah mencapai 2,98 Persen Per Februari 2020. Melalui Siaran Pers Bank Indonesia, BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas untuk bank umum konvensional dari semula 8 Persen menjadi 4 Persen, meningkatkan triple intervention di pasar spot, DNDF melakukan pembelian SBN di pasar sekunder, menguatkan likuiditas rupiah dengan memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan menggunakan bank kustodi global dan domestic untuk kegiatan investasi. Begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit hingga Rp. 10 Milliar berdasarkan ketepatan membayar.

6. Dampak Kebijakan Terhadap Stabilitas Perekonomian Indonesia

Tidak dapat kita pungkiri bahwa penyebaran virus ini sangat berdampak pada sistem moneter kita terkhususnya perekonomian Indonesia. Ketika penyebaran ini terjadi begitu cepat dan membuat kegiatan ekonomi lumpuh. Seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi tidak dapat dijalankan dengan baik. Pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona, tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK (Nurwati, 2020).

Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta ritel non makanan yang sepi pengunjung. Sektor pariwisata sebagai sektor yang dapat membangkitkan kegiatan ekonomi pun terpaksa dihentikan. Keadaan ini seakan-akan membuat kita tidak berdaya lagi. Kedua tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga tingkat rendah, seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh (Nurwati, 2020).

Pada kasus kali ini maka banyak bidang yang terdampak namun dalam artikel ini kita

akan membahas khusus dalam bidang ekonomi (Chairul iksan burhanudin, 2020). Ekonomi dunia guncang bahkan Indonesia sendiri. Percepatan virus ini seperti kilatan yang menyambar secara tiba-tiba bagi masyarakat. Skenario paling moderat sekalipun memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh melambat dibanding tahun-tahun lalu. Bayang-bayang resesi atau pelemahan ekonomi Indonesia tidak lagi terelakkan. Kalau kondisi seperti ini berlanjut terus menerus, maka besar kemungkinan akan terjadi darurat ekonomi. Hal itu bukan tanpa alasan, karena saat ini sudah tidak ada gerakan ekonomi yang sesuai dengan ekspektasi. Pengangguran semakin banyak. Masyarakat di seluruh struktur sosial telah banyak yang kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Resesi ekonomi tingkat keluarga tidak terhindarkan. Ketakutan didalam masyarakat tentu saja ada, namun kembali kita perhatikan bahwa masyarakat juga membutuhkan pendapatan ataupun penghasilan untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga kestabilan tubuhnya dengan menjaga daya tahan tubuh dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Kedua hal ini sangat bertolak belakang, mengapa? Disatu pihak mereka menginginkan kesehatan dan mereka juga melakukan serta menjalankan sosial distancing agar mengurangi penyebaran virus corona, dikarenakan kasus ini semakin meningkat. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan dari masyarakat itu sendiri. Ketika mereka hanya dirumah saja dan tidak melakukan aktivitas diluar rumah bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan untuk mempertahankan hidupnya. Ini terkhusus kepada masyarakat yang pendapatan dan penghasilannya boleh diterima jika mereka bekerja dan pekerjaan mereka tersebut merupakan aktivitas yang berada diluar ruangan. Bagaimana hal ini bisa mereka terima? Sebenarnya ini merupakan masalah yang cukup besar dari antara masalah yang pernah terjadi. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka juga mementingkan kesehatannya. Namun ketika itu pula masyarakat dapat terganggu kesehatannya jika mereka tidak menerima asupan gizi terbaik. Sama saja kebijakan pemerintah soal sosial distancing belum berjalan optimal. Bisa dikatakan bahwa kebijakan ini memang berdampak namun dapat menimbulkan masalah baru ketika pemerintah tidak memperhatikan variabel lain yang terkait.

Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau *Covid 19* terus bergulir (Anwar, 2020). Kita menyadari bahwa pemerintah berupaya keras dalam menangani masalah mewabahnya virus corona ini namun kelihatannya pemerintah kurang mengoptimalkan hal ini kepada masyarakat menengah kebawah padahal bisa dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia berada pada kelas menengah kebawah. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat namun terbatas untuk melakukan aktivitas. Upaya-upaya pemberian bantuan pun belum diterima seluruh masyarakat. Kami turut bingung, apa yang salah dalam kebijakan ini ? Sungguh kita akui untuk masalah ini pemerintah banyak membuat keputusan dalam kebijakannya memberi bantuan kepada masyarakat namun kenyataannya banyak masyarakat yang tidak merasakan bantuan tersebut. Entah apa yang menjadi masalah, antek-antek pemerintah kah yang kurang optimal dalam menjalankan kebijakan presiden itu sendiri atau hal lain yang menjadi masalahnya ?

Jika virus ini terus mewabah dan tidak ada jalan keluarnya maka kemiskinan semakin merajalela dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berimbas ke berbagai bidang termaksud kepada kesehatan masyarakat yang terutama. Jika hal ini terjadi maka ini

merupakan masalah besar. Untuk itulah perlunya tindakan lanjut akan hal yang ini bisa diatasi mengingat pertumbuhan ekonomi yang sudah melemah. Saat ini perlu keterbukaan antara masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menuntaskan hal ini agar masalah kesenjangan dalam bidang ekonomi tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan rakyat kecil ditengah-tengah kasus ini dikarenakan imbas terbesar akan masalah mewabahnya virus ini adalah mereka sendiri. Semua upaya yang dilakukan masyarakat seperti menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil.

Beberapa langkah yang dapat difokuskan yaitu : *Pertama*, Pemerintah perlu fokus memberi bantuan kepada masyarakat kecil yang tidak mendapatkan penghasilan tetap dan sama sekali tidak mendapatkan penghasilan akibat sosial distancing untuk mengurangi masalah masyarakat. Dalam bentuk stimulus. *Kedua*, Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan dengan layanan yang baik bagi masyarakat. *Ketiga*, Pemerintah perlu fokus untuk menemukan vaksin atau obat potensial untuk menemukan titik terbaik masalah ini. Keempat, Pemerintah harus melihat kembali data dan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Sehingga semua kemungkinan yang ada bisa tepat sasaran. Sekarang ini tidak perlu fokus untuk masalah besar memperbaiki keadaan ekonomi baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Kita perlu fokus dulu menuntaskan masalah virus ini, ketika virus ini sudah menemukan titik terang maka kita dapat menetapkan kebijakan lain untuk memperbaiki perekonomian kita yang melemah. Kita bisa jika kita mau bekerjasama untuk mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan penjabaran dalam pembahasan diisimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari Covid-19 bagi perekonomian Indonesia saat ini yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi Covid-19. Di tengah risiko kesehatan masyarakat yang signifikan yang ditimbulkan COVID-19 kepada dunia, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk mengoordinasikan tanggapan internasional terhadap penyakit tersebut. Kelompok yang paling rentan terkena virus ini adalah mereka yang memiliki pertahanan kekebalan rendah, seperti orang tua yang sistem kekebalannya menurun karena usia dan semakin diperburuk oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya juga anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan "membunuh" negara-negara di seluruh dunia.

Dalam dunia yang sangat terhubung dan terintegrasi, dampak penyakit di luar kematian dan morbiditas telah terlihat jelas sejak wabah. Kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Jika pandemi ini terus meningkat maka banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Pengangguran di Indonesia yang menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Oleh karena itu peran, upaya dan kebijakan dari pemerintah lah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah dengan memberika berbagai macam bantuan sosial dengan harapan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada pembatasan pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Masyarakat Indonesia diminta untuk

mengikuti segala arahan pemerintah dengan harapan memulihkan kembali keadaan seperti sediakala.

Dampak yang dialami sector ekonomi saat ini adalah

1. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta," . Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. Selanjutnya dampak kedua, *PMI Manufacturing Indonesia* mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, *PMI Manufacturing* masih berada di angka 49. Adapun *PMI Manufacturing* ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen *year-to-date(ytd)*.
4. Inflasi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen *year-on-year (yoy)*. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Kelima, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dariCina.
7. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan keCina.
8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.

Kondisi ini menjelaskan penurunan kegiatan ekonomi akibat terdampak Covid 19. Hal ini bisa saja membuat perekonomian kita melemah bahkan lumpuh jika tidak ada penanganan serius. Dalam setiap kebijakan pemerintah perlu melihat apakah hal tersebut akan berjalan seefektif mungkin. Banyak hal yang sudah pemerintah beri kepada masyarakat untuk menuntaskan masalah ini, namun beberapa pihak mungkin menyalahgunakan data dan dana demi kepentingan pribadi. Ketidakjujuran ini membuat keadaan masyarakat yang semakin resah, banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sepertinya banyak data dan dana yang salah sasaran. Ketidakpastian ekonomi ini pun sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa bekerja dengan baik, namun dikarenakan mewabahnya virus ini semua kegiatan ekonomi lumpuh. Masyarakat dan pemerintah harus bergandengan tangan mengatasi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, P. (2020). Polemik Lockdown di Tengah Kegelisahan Kaum Marjinal. *ADALAH-Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 29–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15392>
- Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona Program Asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional. *Adalah Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4, 101–106.

- Chairul iksan burhanudin, M. nur abdi. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *E-ISSN:2621-4377&P-ISSN:1829-8524*, 17(1), 711–719. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/866/816>
- Hanoatubun, S., Kristen, U., Wacana, S., & Indonesia, P. (2020). Universitas muhammadiyah enrekan. *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, 2(2), 146–153.
- Indriya, I. (2020). Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15048>
- Nurwati, R. A. M. dan R. N. (2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di indonesia. *Kesejahteraan Sosial*.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, O. M., Yunihastuti, E., Penanganan, T., New, I., ... Cipto, R. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4 No. 1, 115–120.
- Tirto.id. 2020.Dapat diakses melalui <https://tirto.id/kemensos-10-juta-keluarga-terima-pkh-per-bulan-mulai-april-juni-eKc7>.Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.
- World Health Organization (WHO).2020. WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020.Dapat diakses melalui <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sremarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>.Diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2020.
- Youtube. Sekretariat Presiden. 2020. Keterangan Pers Presiden RI Terkait Kebijakan Ekonomi Dampak Covid-19, Istana Bogor, 31 Maret 2020.Dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=OBR36rOqYV4>.Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.
- Youtube. 2020. [LIVE] - Press Conference Bersama terkait Stimulus Ekonomi (01/04). Dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=D6Z08zaq0A8>.Diakses pada tanggal 1 April 2020.